

PENGELOLAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA BARAT

Lia Afriza^{1a}, Haryadi Darmawan², Anti Riyanti³

^{1,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata, ² Sekolah Tinggi Pariwisata
Bandung

^a Lia Afriza, lia.afriza@gmail.com

ABSTRACT

West Java has diverse tourism resource potentials ranging from nature tourism attractions, cultural tourism, man-made tourism which is supported by natural conditions, socio-culture, availability of facilities, and accessibility that can sustain tourism. The purpose of this study is to determine tourist villages in West Java, to analyze the management of tourism villages in West Java and the extent of community involvement in West Java tourism villages. The method used in this study uses a descriptive analytical approach that is the management of a tourist village in West Java. Then analyzes it using the help of theories that are relevant to the context of problem identification. This descriptive analytic method was chosen by the researcher because it was considered the most appropriate in the context of the study, which is exploratory and mapping in nature by considering non-exact qualitative elements. Triangulation in the testing of credibility is defined as checking data from various sources in various ways and at various times. Tourism village is a village that is managed with community involvement, so that the organization of the community along with the development of villages that have operational funds, because it is supported by the government, it requires legality accountability. In the management of tourism villages, synergy is needed from various related agencies/offices to facilitate understanding and management of tourism villages.

Keyword: tourism villages, west java,

ABSTRAK

Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya pariwisata yang beranekaragam mulai dari atraksi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan manusia yang didukung dengan kondisi alam, sosial budaya, ketersediaan fasilitas, serta aksesibilitas yang mampu menopang pariwisata. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi desa wisata di Jawa Barat, menganalisis pengelolaan desa wisata di Jawa Barat dan sejauh mana keterlibatan masyarakat di desa wisata Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu pengelolaan desa wisata di Jawa Barat, lalu menganalisisnya dengan memanfaatkan bantuan teori-teori yang relevan dengan konteks pada identifikasi masalah. Metode deskriptif analitis ini dipilih oleh peneliti karena dianggap paling sesuai dengan konteks penelitian, yaitu bersifat eksploratif dan pemetaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur kualitatif yang bersifat non eksak. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Desa wisata merupakan desa yang dikelola dengan pelibatan masyarakat, sehingga organisasi dari masyarakat seiring berkembangnya desa yang memiliki dana operasional, karena dibantu oleh pemerintah maka diperlukan pertanggungjawaban secara legalitas. Dalam

pengelolaan desa wisata diperlukan sinergitas dari berbagai instansi/dinas terkait untuk memudahkan dalam pemahaman dan pengelolaan desa wisata.

Riwayat Artikel:

(Diterima: 28-09-2018; Ditelaah: 29-09-2018;
Disetujui: 30-10-2018)

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata di Indonesia memainkan peranan penting dalam hal sumbangan devisa bagi negara. Undang-Undang Kepariwisata No. 10 tahun 2009 telah mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan kegiatan pariwisata di wilayahnya masing-masing secara komprehensif, bagi Pemerintah Daerah dengan prinsip otonomi ini dapat bersaing secara kompetitif mengembangkan potensi daerahnya guna terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan pemberdayaan serta peran masyarakat.

Upaya pembangunan pariwisata di Provinsi Jawa Barat ini ditunjukkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat dengan memperkenalkan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya pariwisata yang beranekaragam mulai dari atraksi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan manusia yang didukung dengan kondisi alam, sosial budaya, ketersediaan fasilitas, serta aksesibilitas yang mampu menopang pariwisata. Adanya perubahan minat wisatawan terhadap destinasi wisata yaitu tumbuhnya motivasi perjalanan wisata minat khusus yang menginginkan wisata kembali ke alam, interaksi dengan masyarakat lokal, telah mendorong pengembangan wisata pedesaan. Pariwisata pedesaan ini merupakan model pariwisata baru yang dikenal dengan pariwisata minat khusus (*special interest tourism*).

Menurut UU No. 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa wisata sebagai

suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Desa wisata sebagai salah satu daya tarik wisata yang tumbuh dengan cepat serta ada di setiap daerah. Hal ini karena desa wisata memiliki keunikan, perbedaan, nature (*hospitality*), edukasi serta pemberdayaan masyarakat dalam perkembangannya. Desa merupakan bagian wilayah dari setiap Kabupaten/Kota yang memiliki peluang sebagai pilar pembangunan daerah maupun nasional. Pengembangan desa sebagai daya tarik wisata terkait dengan alam dan kontak masyarakat, juga merupakan bentuk integrasi antara wisata, atraksi dari budaya hidup masyarakatnya yang mengandung unsur ekonomi, dan akomodasi yang tidak terkontaminasi perkotaan, misalkan adanya *homestay*. Daya tarik wisata desa ini tentunya harus didukung fasilitas dan pengelolaan yang memiliki value.

Wisata pedesaan merupakan suatu kegiatan pariwisata di wilayah yang menawarkan daya tarik wisata berupa keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan (*kehidupan sosial, ekonomi, adat istiadat masyarakat setempat, arsitektur bangunan maupun tata ruang desa yang khas*). Berbagai potensi seni budaya tradisi yang unik perlu dikembangkan di desa serta dikemas menjadi daya tarik sekaligus atraksi wisata yang menarik, mengingat berbagai atraksi di masing-masing daerah itu tidak sama. Oleh karena itu, sebelum sebuah kawasan atau daerah tujuan wisata tertentu dikembangkan, sebaiknya para perencana pembangunan pariwisata mengetahui dengan jelas dan detail segala sesuatu yang menyangkut potensi dan kendala yang dimiliki oleh suatu kawasan. Paradigma baru pariwisata adalah milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Desa merupakan satuan terkecil wilayah dan masyarakat dari bangsa/negara yang menunjukkan keragaman Indonesia, serta gerak perkembangan pariwisata yang dilihat dalam berbagai terminologi seperti, *sustainable tourism development, village tourism, ecotourism*, merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin

agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata yang bukan perkotaan. Pada dasarnya, dalam aktivitas wisata yang digolongkan ke dalam kategori wisata pedesaan harus mencakup tiga besaran pokok, yaitu produk wisata itu sendiri, yang bentukannya dapat berasal dari alam, budaya, dan buatan, sumber daya manusia yang akan menjadi penyelenggara aktivitas tersebut (operator), dan ruang-ruang yang memungkinkan terciptanya interaksi lebih dalam antara wisatawan dengan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Pemodelan desa wisata bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan harus terus secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas yang baru bagi desa sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Jawa Barat. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan desa wisata di Jawa Barat sangat tinggi sebagai upaya mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, maka dibutuhkan sebuah pengembangan dan pengelolaan desa wisata dalam bentuk sebuah Konsep Manajemen Desa Wisata yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan desa wisata di Jawa Barat.

Adapun penelitian ini menggunakan skema pengembangan desa wisata didasarkan community base, terdapat pada gambar berikut:



Gambar 1. Skema Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan Base Community (Sumber: Peneliti, 2019)

Tujuan dari pengembangan potensi desa dengan Konsep Manajemen Desa Wisata merupakan kajian komprehensif serta pengembangan secara implementatif dalam pengelolaan terhadap potensi-potensi wisata yang dimiliki serta pemberdayaan masyarakat desa

sebagai pelaku utama serta sebagai upaya memberikan masukan tentang produk wisata sebagai ragam dari pengembangan pariwisata di kawasan yang bersangkutan. Sistem internal kepariwisataan terdiri dari perencanaan, kebijakan, upaya pemasaran, aspek finansial dan organisasi. Ada tiga sub sistem yang membentuk keseluruhan pemahaman tentang sistem kepariwisataan. Secara lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sub-sistem industri pariwisata yang menggambarkan hubungan antara penawaran dengan permintaan.



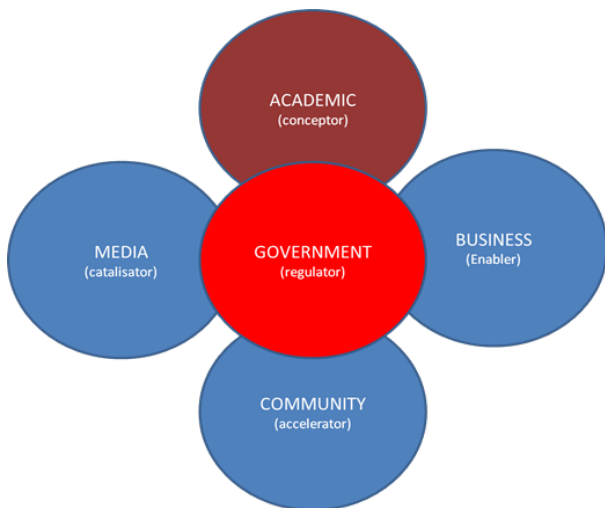
Gambar 2 Hubungan Penawaran Dengan Permintaan

2. Sub-sistem destinasi yang menggambarkan saling keterkaitan antar masing-masing komponen destinasi.



Gambar 3. Keterkaitan Antar Komponen Destinasi

3. Sub-sistem kelembagaan yang menggambarkan hubungan antara lembaga-lembaga masyarakat, industri, dan pemerintah yang diperlukan agar pariwisata berkembang dengan memberi manfaat bagi semua pihak secara seimbang.



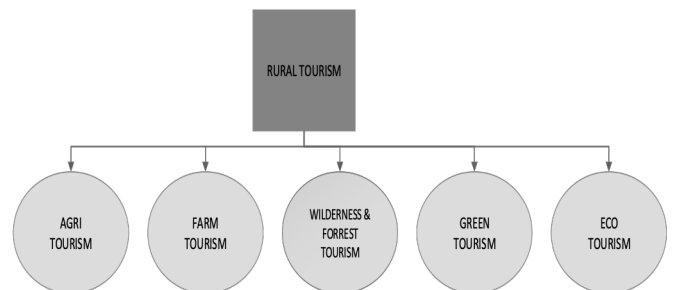
Gambar 4. Hubungan Antar Lembaga

Secara umum pariwisata berbasis masyarakat sering juga disebut dengan istilah Community Based Tourism (CBT), pariwisata berbasis masyarakat ini merupakan sebuah konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Dimana masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan dan penyampaian pendapat (Goodwin dan Santili, 2009). Community Based Tourism (CBT) adalah pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan atau dengan kata lain CBT merupakan alat bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan (Suansri, 2003). Dukungan masyarakat melalui peran dan fungsinya dalam kegiatan pariwisata merupakan salah satu tujuan dari pengembangan kepariwisataan yang dikemukakan oleh UNWTO yaitu terdiri dari:

- Pro Job
- Pro Growth
- Pro Poor
- Pro Environment

Sustainable Livelihood merupakan suatu konsep dari Sustainable Development yang dikembangkan oleh International Fund For Agricultural Development (IFAD). Meskipun konsep ini dalam konteks pembangunan pertanian, namun berdasarkan Geoff Wall dalam Asia Tourism Forum (ATF) 2012 hal ini dapat diterapkan pada pembangunan kepariwisataan. Dalam konsep ini IFAD menjelaskan bahwa masyarakat menjadi objek utama suatu pembangunan dibandingkan kepada sumber daya maupun pemerintah dan digunakan dalam mengidentifikasi hambatan serta peluang dalam memanfaatkan sumber daya di sekitarnya.

Menurut Sharpley and sharpley (1997, dalam Robert and Derek Hall 2001:15) di dalam Rural Tourism terdapat jenis wisata lain yang membentuknya yaitu Agritourism, farm tourism, wilderness and foresttourism, green tourism, dan ecotourism:



Gambar 5

Sumber: Sharpley and sharpley (1997) (dalam Robert and Derek Hall 2001:15)

Tabel 1. Kajian Teori Komponen Desa Wisata

| No | Sumber Teori | Komponen Desa Wisata |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Priasukmana dan Mulyadin (2001) | Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya. Keamanan di desa tersebut terjamin. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai. Beriklim sejuk atau dingin. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. |
| 2 | Gumelar (2010) | Keunikan, keaslian, sifat khas |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa</p> <p>Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung</p> <p>Memiliki peluang untuk berkembang, baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.</p> |
| 3 | Putra (2006) | <p>Memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah setempat.</p> <p>Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual.</p> <p>Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya.</p> <p>Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program Desa Wisata.</p> <p>Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.</p> |
| 4 | Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2013: 24) | <p>Batasan geografis ataupun administratif yang jelas.</p> <p>Potensi daya tarik wisata baik alam, budaya maupun karya kreatif sebagai unsur penarik kunjungan wisatawan.</p> <p>Masyarakat yang antusias dan mendukung pengembangan desa wisata.</p> <p>Sarana prasarana yang berupa jaringan jalan, moda angkutan wisata yang mendukung kemudahan wisatawan dalam mencapai desa tersebut.</p> <p>Organisasi pengelolaan desa wisata yang berfungsi sebagai unit pengelola kegiatan wisata di desa tersebut (merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengevaluasi/monitoring kegiatan-kegiatan pengembangan).</p> <p>Sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak pengelolaan kegiatan wisata di desa tersebut.</p> |

Sumber : Hasil kajian, 2019

MATERI DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu pengelolaan desa wisata di Jawa Barat, lalu menganalisisnya dengan memanfaatkan bantuan teori-teori yang relevan dengan konteks pada identifikasi masalah. Metode deskriptif analitis ini dipilih oleh peneliti karena dianggap paling sesuai dengan konteks penelitian, yaitu bersifat eksploratif dan pemetaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur kualitatif yang bersifat non eksak.

Dalam penelitian ini dilakukan eksplorasi dengan metode observasi, kuesioner dan wawancara yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi pengelolaan desa wisata. Kegiatan penelitian ini melibatkan berbagai pihak diantaranya pemerintah, swasta (industri), asosiasi, serta masyarakat, sehingga bentuk model yang dihasilkan adalah bentuk integrasi yang dapat memberikan multiplier effect (dampak berganda) di lintas sektor dimana pariwisata berperan sebagai leading sector.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

1. In-depth interview terhadap pihak pemerintah terkait, ahli pariwisata, wisatawan serta para pakar/swasta yang turut berperan dan mempunyai atensi terhadap pengelolaan desa wisata.
2. Observasi dan survey di lapangan dalam rangka melakukan pengelolaan desa wisata baik dalam hal atraksi wisata alam, amenitas dan aksesibilitas, pasar (wisatawan) serta terhadap keterlibatan masyarakat dalam pariwisata. Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Sutrisno Hadi dalam Prastowo, 2010).
3. Studi literatur dari data sekunder meliputi kajian literatur, dan jurnal penelitian.
4. Kuesioner, menggali data-data tentang dampak sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Ruang lingkup kegiatan dalam pengelolaan ini terdiri dari:

1. Menentukan syarat dan ruang lingkup desa wisata
2. Menyusun analisis indikator/elemen sebagai suatu syarat desa tersebut dapat menjadi desa wisata
3. Pengelolaan desa wisata
4. Mengumpulkan dan mengolah data, termasuk di dalamnya melakukan FGD
5. Merumuskan penetapan kriteria/standar dalam pengelolaan desa wisata
6. Menyusun pedoman pengelolaan desa wisata

Seluruh kegiatan survey pengelolaan desa wisata dan hasil pembahasan dari peraturan pasal-pasal yang terkait dengan standarisasi pengelolaan desa wisata harus dinaungi dengan Peraturan Gubernur tentang desa wisata. Dengan demikian data yang valid sangat penting diperoleh dalam penelitian ini, dalam arti bahwa data yang diperoleh tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Keabsahan data juga dapat dikatakan sebagai data yang valid dan reliabel, peneliti melakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Menurut Sugiyono (2017), triangulasi sumber merupakan metode untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama yaitu teknik wawancara semi terstruktur. Metode ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap apa yang ditemukan. Uji kredibilitas data dengan metode triangulasi sumber ini dilakukan pada beberapa informan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pengembangan Desa Wisata Hijau (Kementerian Koperasi & UKM; 20) telah ditetapkan tingkatan perkembangan desa wisata terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yang meliputi (1) Desa wisata embrio, (2) desa wisata berkembang dan (3) desa wisata maju.

A. Desa Wisata Embrio

Desa Wisata Embrio merupakan desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelolanya menjadi desa wisata. Adapun kriteria yang ada pada Desa Wisata Embrio umumnya adalah:

- Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata
- Pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas
- Belum ada/masih sedikit wisatawan yang berkunjung
- Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/masih rendah.

Adapun perincian kegiatan dari masing-masing langkah sebagai desa embrio dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Desa Wisata

a. Identifikasi potensi daya tarik wisata

- (1) Melakukan pencatatan terhadap potensi-potensi daya tarik antara lain:
 - air terjun, spot-spot pemandangan, persawahan, dll
 - kesenian, mata pencaharian masyarakat, kuliner dll
 - filosofi hidup, hukum adat, norma masyarakat dll
- (2) Melakukan dokumentasi secara terstruktur terhadap potensi-potensi tersebut di atas berdasarkan:
 - Klasifikasi/Pengelompokan atraksi wisata; alam, budaya, buatan
 - Klasifikasi/Pengelompokan berdasarkan tingkat keunikan
 - Klasifikasi/Pengelompokan jarak dengan pusat desa wisata
 - Klasifikasi/Pengelompokan tingkat kesulitan (apabila ada)
 - Membuat tujuan/tematik pengembangan terhadap desa wisata

b. Identifikasi penyediaan fasilitas umum dan fasilitas khusus

- (1) Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan fasilitas wisata baik secara khusus maupun secara umum dengan teknik:
 - Menanyakan langsung kepada wisatawan
 - Melihat/observasi/berkunjung ke desa wisata lainnya yang memiliki karakteristik sejenis
- (2) Mendokumentasikan/mencatat kebutuhan secara baik

c. Identifikasi kondisi aksesibilitas intra dan inter kawasan

- (1) Melakukan pencatatan jarak dalam mencapai atraksi wisata ataupun fasilitas wisata
- (2) Melakukan pencatatan kebutuhan alat transportasi dalam mencapai atraksi wisata ataupun fasilitas wisata

d. Identifikasi peranan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata

- (1) Pencatatan/identifikasi tentang profesi masyarakat desa
- (2) Klasifikasi terhadap profesi/usaha masyarakat yang akan menjadi peluang aktivitas wisata (pengrajin, guide, petani, homestay, dll) di desa wisata.

2. Pengorganisasian Desa Wisata

a. Identifikasi isu dan permasalahan

- (1) Melakukan identifikasi melalui observasi dan wawancara kepada seluruh stakeholders terhadap isu dan permasalahan dalam pengembangan desa wisata.
- (2) Melakukan FGD terhadap isu dan permasalahan dalam pengembangan desa wisata

b. Identifikasi dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat

- (1) Berbasis kepada mata pencahariannya
- (2) Pengelompokan profesi/usaha masyarakat yang terdapat di desa wisata dilakukan secara musyawarah dan mufakat
- (3) Pembentukan kelompok/forum berdasarkan profesi/usaha masyarakat

c. Pembentukan forum komunikasi masyarakat/Kompepar serta tupoksinya

- (1) Pembentukan struktur penggerak/pembangun desa wisata secara sah yang dilengkapi oleh atributnya (Anggaran Dasar & Rumah Tangga, Surat Keputusan, Struktur organisasi, tupoksi dll),
- (2) Ditetapkan oleh Pemerintahan Desa dan dilaporkan kepada struktur yang lebih tinggi sebagai pembina (Kelurahan/Dinas Pariwisata/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- (3) Penetapan program kerja per tahun berdasarkan kepada Struktur Organisasi Kelompok/forum penggerak/pembangun desa wisata

d. Sosialisasi pengelolaan desa wisata

- (1) Sosialisasi kepada kelompok usaha masyarakat tentang peningkatan kapasitas desa yang berbasis kepada desa wisata dengan mengundang ahli atau narasumber yang kompeten
- (2) Sosialisasi terkait dengan struktur pengelolaan desa wisata serta program kerja.

3. Langkah Implementasi Pembangunan Desa Wisata

Adapun langkah-langkah dalam pembangunan desa wisata adalah sebagai berikut:

- (1) Terbentuknya kelompok swadaya masyarakat. Kelompok swadaya masyarakat merupakan kelompok usaha/profesi masyarakat yang terbentuk dan disahkan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan,
- (2) Terbentuk forum komunikasi masyarakat/Kompepar serta tupoksinya. Kelompok/forum komunikasi desa wisata/merupakan kelompok penggerak pariwisata desa wisata yang disahkan oleh Pemerintah Desa dan dilaporkan kepada Dinas Pariwisata atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (3) Tersedianya kebijakan pengelolaan dan badan pengelola desa wisata. Kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan/Peraturan Desa merupakan hal dasar bagi pengembangan desa wisata, adapun Surat Keputusan/

Peraturan Desa yang dibutuhkan terhadap pembangunan desa wisata antara lain:

- Surat Keputusan/Peraturan Desa tentang pembentukan dan fungsi kelompok/forum penggerak pariwisata berbasis desa wisata
- Surat Keputusan/Peraturan Desa tentang pembentukan dan fungsi kelompok atau forum swadaya/profesi masyarakat
- Surat Keputusan/Peraturan Desa tentang pembentukan dan fungsi Badan Usaha Milik Desa.

- (4) Tersedianya paket wisata yang umum. Dari masing-masing potensi desa tersebut, maka dikembangkan paket wisata yang tidak bertematik atau umum, misalnya paket wisata hiking.
- (5) Peningkatan kualitas fasilitas dasar dan aksesibilitas di dalam kawasan. Adalah aktivitas dalam memperbaiki kondisi fasilitas-fasilitas umum seperti kamar mandi, tempat makan, dll. Adapun perbaikan aksesibilitas di dalam kawasan antara lain meliputi perbaikan jalan setapak, perbaikan tangga, pavingisasi dll.
- (6) Benchmarking Pengelolaan Desa Wisata. Melakukan studi banding/komparasi kepada desa-desa wisata yang telah berhasil dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan desa wisata.

4. Langkah Evaluasi dan Monitoring

a. Teridentifikasinya Jumlah Wisatawan

Kegiatan yang dilakukan pada point ini adalah melakukan pendataan terhadap jumlah wisatawan yang datang dan dilakukan perhitungannya secara periodik.

b. Penataan Manajemen Pengunjung

Pengelolaan pengunjung merupakan hal penting dalam mencegah terkonsentrasinya wisatawan pada suatu area tertentu yang berfungsi dalam menyesuaikan dengan daya dukung fisik. Adapun jenis manajemen pengunjung yang dapat dilakukan adalah:

- (1) Mengembangkan atraksi-atraksi wisata baru sekunde
- (2) Membagi wisatawan dalam kelompok-kelompok kecil.

- (3) Melaksanakan pendistribusian kepadatan pengunjung pada atraksi wisata sekunder apabila atraksi wisata utama telah terjadi kepadatan yang tinggi

c. Terbentuknya Kerjasama dengan Travel Operator/Travel Agent

Pada langkah ini, pengelola desa wisata (kompepar/pokdarwis/desa) melakukan penyebaran informasi kepada travel-travel agent yang sering membawa wisatawan ke desa wisata. Dalam penyebaran informasi ini dibutuhkan liflet/brosur dan melakukan penyebaran informasi melalui media digital.

d. Evaluasi paket wisata oleh wisatawan dan TO/TA

Dalam pembuatan paket wisata umum, langkah ini adalah dengan melakukan diskusi wisatawan dan Travel Agent tentang kualitas terhadap paket wisata maupun sarananya.

B. Desa Wisata Berkembang

Desa Wisata Berkembang merupakan desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolannya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung. Adapun kriteria yang ada pada Desa Wisata Berkembang pada umumnya adalah:

- (1) Sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan
- (2) Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata
- (3) Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat setempat
- (4) Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh
- (5) Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah atau swasta)

Adapun perincian kegiatan dari masing-masing langkah sebagai **desa berkembang** dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Desa Wisata

a. Pemetaan potensi daya tarik wisata.

Dalam point ini dimana hasil identifikasi atau pencatatan, kemudian dikelompokkan menurut tipologi yang berlaku,

- (1) Sumber daya alam; air terjun, spot-spot pemandangan, persawahan, dll
- (2) Sumber daya budaya; kesenian, mata pencaharian masyarakat, kuliner dll
- (3) Sumber daya buatan manusia
- (4) Norma budaya; filosofi hidup, hukum adat, norma masyarakat dll

b. Penyediaan fasilitas umum dasar

Penyediaan fasilitas umum dasar harus disesuaikan dan melihat kebutuhan dari wisatawan yang berkunjung. Adapun fasilitas umum dasar yang dapat dikembangkan misalnya berupa fasilitas *homestay*, fasilitas makan minum, fasilitas transportasi dll, yang keseluruhan dapat dibuat/dikembangkan oleh masyarakat, bersifat ekologis, ekonomis dan sosial.

Dalam penyediaan fasilitas umum dasar ini, penerapan standar arsitektur lokal yang terkait, misalnya pada penginapan yang mengadopsi pola dan ruang unsur kampung yang melingkar dengan bangunan menyebar (tidak menggunakan bangunan bertingkat) dan ruang terbuka hijau.

c. Penataan zonasi

Dalam mengantisipasi pertumbuhan aktivitas dan wisatawan, pada fase ini sudah dilakukan pembagian zonasi pada wilayah desa. Adapun pembagian zonasi dapat dilakukan dengan contoh sebagai berikut:

- Zona Homestay
- Zona Makan dan Minum
- Zona Camping
- Zona Gathering

d. Peningkatan kondisi aksesibilitas

Peningkatan kualitas aksesibilitas menuju desa wisata semakin dibutuhkan apabila dirasakan jumlah kunjungan wisatawan semakin tinggi. Beberapa peningkatan kondisi aksesibilitas menuju desa wisata antara lain:

- Papan petunjuk arah
- Lahan parkir
- Alat transportasi desa (apabila dibutuhkan)
- Pengaspalan jalan (apabila dibutuhkan dan dilakukan oleh pemerintah daerah)

- Pintu gerbang (apabila dibutuhkan)

e. Peningkatan pemanfaatan kehidupan dan budaya masyarakat

Meskipun pada tipe desa embrio telah dilakukan pemanfaatan, pada tahapan desa berkembang bahwa pola kehidupan dan budaya masyarakat lebih dikuatkan nilai-nilai keunikan dan kearifan baik dari kualitas maupun partisipasinya sehingga dapat menjadi daya tarik wisata.

2. Langkah Implementasi Pengorganisasian Desa Wisata

a. Pemetaan permasalahan serta solusi

Sebagai desa wisata berkembang yang telah dikunjungi wisatawan dalam jumlah yang tinggi akan memiliki dampak baik kepada lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Pada langkah ini pihak pengelola (Kompepar/Pokdarwis) bersama dengan pemerintah desa melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi dalam operasionalisasi desa wisata dan melalui diskusi ini dicarikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Adapun pemetaan permasalahan pada umumnya dapat terbagi ke dalam:

- Permasalahan Dampak Lingkungan
- Permasalahan Pengelolaan Desa Wisata
- Permasalahan Pembagian dan Pengelolaan Hasil Usaha
- Permasalahan Sosial

Pemetaan permasalahan serta solusi yang dilakukan secara periodik melalui FGD diharapkan akan meminimalisasi benturan dan bias nilai atau terjadinya hegemoni nilai atau dominasi nilai di desa wisata.

b. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat dan forum komunikasi masyarakat/Kompepar.

Sebagai desa wisata berkembang, dimana terjadi peningkatan jumlah wisatawan harus diiringi oleh peningkatan profesionalisme terhadap pengelola dalam hal ini adalah kelompok swadaya masyarakat atau kelompok pengelola (Kompepar/Pokdarwis). Peningkatan kualitas ini terkait dengan pelatihan-pelatihan yang antara lain meliputi:

- DIKLAT Manajemen Pariwisata

- DIKLAT Pengelolaan Desa Wisata
- DIKLAT Kuliner
- DIKLAT Pemasaran On Line
- DIKLAT Souvenir dan Pengemasan
- DIKLAT Pengelolaan Homestay.

Dalam hal ini pengelola desa wisata harus mampu mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, agar memberikan manfaat kepada pelaku dan secara langsung kepada kualitas produk di desa wisata.

Pola peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan mengundang narasumber atau berpartisipasi dalam program DIKLAT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian Pusat terkait.

c. Pembentukan BUMDes/Koperasi

Dalam pengelolaan profesional, pada desa wisata ini secara akuntabilitas dapat membentuk BUMDes/Koperasi yang secara legal merupakan badan usaha pengelola desa wisata.

3. Langkah Implementasi Pembangunan Desa Wisata

- (1) Terimplementasinya kebijakan pengelolaan dan badan pengelola desa wisata. Dalam langkah ini, kebijakan maupun aturan dalam bentuk SK, PERDES seperti pada point 3 telah diimplementasikan secara konsisten. Keseluruhan SK/PERDES memiliki sifat; 1) berdimensi jangka panjang, 2) bekerjasama dengan masyarakat.
- (2) Tersedianya paket wisata umum dan tematik. Selain paket wisata yang bersifat umum, pada langkah ini telah dikembangkan paket-paket yang bersifat khusus atau tematik sebagai bentuk pengembangan aktivitas wisata dengan tetap memanfaatkan unsur potensi desa.
- (3) Peningkatan kualitas dan penambahan fasilitas wisata dasar desa wisata. Dikarenakan semakin meningkatnya kegiatan dan aktivitas wisata, desa wisata sudah harus melaksanakan peningkatan kualitas maupun penambahan fasilitas dasar yang akan menambah kenyamanan wisatawan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:
 - Peningkatan kualitas homestay
 - Penyediaan layanan kesehatan dan P3K

- Peningkatan kualitas sanitasi (toilet & kamar mandi)
- Peningkatan kualitas kebersihan desa
- Penyediaan tourist information centre yang berfungsi sebagai juga pusat layanan wisatawan.
- Penerapan standar-standar pengelolaan fasilitas wisata

- (4) Benchmarking pengelolaan desa wisata. Studi banding/komparasi tetap harus dilakukan terhadap pengelolaan di desa-desa wisata yang telah berhasil mengembangkan potensi desanya. Selain dari pengelola, beberapa masyarakat diikutsertakan ke dalam kegiatan ini guna memberikan pemahaman menyeluruh terhadap pengembangan desa wisata

4. Langkah Implementasi Evaluasi dan Monitoring Desa Wisata

a. Pencatatan terhadap hasil kinerja desa wisata

Kinerja desa wisata pada tahap ini akan dilihat pada peningkatan jumlah wisatawan serta hasil terhadap pendapatan dari aktivitas wisatawan di desa wisata. Secara umum laporan terhadap jumlah wisatawan dilaporkan secara periodik (bulanan) kepada pemerintah daerah maupun masyarakat desa, dan laporan pendapatan dari kedatangan wisatawan dilaporkan/disosialisasikan kepada seluruh masyarakat desa.

b. Meningkatnya kerjasama dengan Travel Agent/Travel Operator

Dengan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta keberadaan fasilitas wisata harus diiringi oleh peningkatan kerjasama dengan Travel Agent/Travel Operator dengan prinsip saling memberikan manfaat antara desa dan Travel Agent/Travel Operator. Indikator terhadap meningkatnya kerjasama dengan Travel Agent/Travel Operator adalah:

- (1) Meningkatnya jumlah Travel Agent/Travel Operator yang mendatangkan wisatawan/tamu ke desa wisata
- (2) Terjalinnnya kontrak kerjasama antara pengelola desa wisata dan Travel Agent/Travel Operator

- (3) Travel Agent/Travel Operator juga mengembangkan paket-paket wisata berbasis kepada potensi desa
- (4) Travel Agent/Travel Operator berpartisipasi dalam peningkatan kualitas fasilitas wisata di desa.

C. Desa Wisata Maju

Desa Wisata Maju merupakan desa wisata yang sudah maju dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinue dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola, seperti Koperasi/Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik. Adapun kriteria yang ada pada Desa Wisata Maju pada umumnya adalah:

- (1) Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya
- (2) Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan
- (3) Sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata sudah memadai
- (4) Masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola usaha pariwisata secara swadaya (SDM, Produk Organisasi, dsb)
- (5) Mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar
- (6) Dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa-desa wisata lainnya.

1. Langkah Implementasi Pembangunan Desa Wisata

a. Penataan dan Peningkatan Kondisi Fasilitas Umum dan Khusus

Dalam fase ini, pengelola desa wisata sudah pada tahapan beutifikasi atau mempercantik tampilan serta pelayanan di desa wisata. Beberapa hal yang dapat termasuk dalam beutifikasi desa wisata meliputi:

- Penataan pintu masuk
- Penataan tempat makan
- Penataan jalur setapak
- Penataan tempat parkir

- Peningkatan fasilitas keselamatan
- Penataan papan petunjuk arah maupun interpretasi

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata

Dalam fase ini masyarakat memiliki peran lebih intensif dalam pengelolaan maupun pengembangan desa wisata, masyarakat melalui kelompok-kelompok akan berperan aktif dalam proses manajemen desa wisata.

Kecermatan mengidentifikasi peranan, kontribusi dan kepentingan komponen pariwisata di destinasi melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja sehingga mampu meredam pertikaian atau konflik dalam masyarakat. Kondisi ini dapat terwujud dengan pelaksanaan musyawarah melalui rapat desa wisata yang dilakukan secara periodik atau isidental.

2. Langkah Implementasi Kelembagaan Desa Wisata

a. Peningkatan sumber daya manusia pengelola dan pelaku usaha

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada pengelola desa dan pelaku usaha di desa merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Program pendidikan dan pelatihan yang diikutsertakan diharapkan memiliki sertifikasi berkualifikasi nasional serta dibiayai secara mandiri atau berpartisipasi dalam program DIKLAT Provinsi maupun Kementerian, beberapa contoh peningkatan sumber daya manusia antara lain:

- Pendidikan Fotografi
- Pendidikan Manajemen
- Pendidikan Keuangan dan Akunting
- Pendidikan Media Grafis
- Pendidikan On Line Marketing

b. Penetapan peraturan terkait dengan insentif dan disinsentif

Kebijakan insentif dan disinsentif merupakan bentuk perlakuan kepada usaha masyarakat maupun perorangan yang diberikan oleh BUMDes/Koperasi sebagai upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas usaha masyarakat.

Penetapan besaran maupun penerima kebijakan insentif dan disinsentif ditetapkan melalui rapat pengurus/anggota dari BUMDes/ Koperasi. Beberapa kebijakan yang dapat diberikan antara lain:

- Memberikan insentif kepada pelaku adat, tokoh masyarakat
- Penyediaan fasilitas kemudahan peminjaman modal
- Pola pemodalannya yang kolektif pada masyarakat yang merupakan perwujudan modal sosial
- Modal kerja kolektif yang dalam unit usaha pariwisata (lahan yang dikonversikan sebagai aset dengan khas lokal yang unik merefleksikan kearifan masyarakat)

c. *Fasilitasi kebutuhan masyarakat melalui Koperasi/BUMDes*

Sebagai sebuah badan usaha yang mandiri, BUMDes/Koperasi sudah dapat memberikan bantuan kepada anggotanya dalam meningkatkan kapasitas usaha, serta pengembangan individu. Adapun program yang dapat dikembangkan adalah:

- Peningkatan modal kerja
- Pemberian beasiswa
- Program pendidikan dan pelatihan
- Sertifikasi

3. Langkah Implementasi Pembangunan Industri Desa Wisata

a. *Peningkatan kualitas produk dan daya saing industri pariwisata*

Dengan keberadaan desa wisata mandiri, maka dibutuhkan peningkatan kualitas produk dan daya saing industri pariwisata di desa wisata. Pengembangan program tersebut antara lain:

- Penentuan pola investasi masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal
- Penguatan jejaring antar usaha pariwisata dan usaha terkait
- Pengadaan mesin-mesin utama
- Peningkatan jejaring penjualan

b. *Diversifikasi paket wisata tematik*

Paket wisata merupakan salah satu daya tarik dalam upaya meningkatkan kapasitas desa wisata. Diversifikasi paket wisata adalah dengan menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki sehingga memiliki nilai kebaruannya. Teknik diversifikasi paket wisata adalah:

- Dilakukan mandiri oleh pengelola
- Melakukan kerja sama dengan Travel Agent/Travel Operator
- Melakukan benchmarking dengan desa wisata lain
- Browsing di internet

c. *Peningkatan kualitas fasilitas wisata dan aksesibilitas intra kawasan*

Peningkatan kualitas fasilitas wisata dan aksesibilitas merupakan hal yang penting dalam menjaga keberlanjutan usaha desa wisata. Prinsip dalam peningkatan kualitas fasilitas wisata dan aksesibilitas pada fase ini adalah:

- Selaraskan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan pro growth, pro job, pro poor dan pro environment
- Menjaga keseimbangan antara keasrian, kelestarian dan keterlibatan masyarakat lokal terhadap investasi pihak industri yang menuntut intensitas aktivitas, fasilitas dan tuntutan pelayanan
- Mempertahankan kualitas pelestarian ditentukan oleh tingkat kesadaran kritis dan keterlibatan masyarakat untuk mengelola nilai heritage, tradisi dan kearifan lokal secara bertanggung jawab.

d. *Benchmarking pengelolaan industri pariwisata berbasis masyarakat*

Melakukan studi banding/komparasi pada desa-desa lain baik observasi langsung atau melalui media elektronik/digital merupakan hal yang harus dilakukan oleh pengelola khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuannya adalah guna mendapatkan informasi kekinian terkait dengan pengembangan desa wisata maupun kepariwisataan pada umumnya.

4. Langkah Implementasi Pemasaran Desa wisata

a. Intensitas promosi desa wisata sebagai destinasi pariwisata serta sebagai industri

Pengelola desa wisata melakukan promosi desa wisata sebagai destinasi pariwisata baik secara off line maupun on line. Kabaharuan data dan informasi merupakan hal yang paling penting dalam melakukan promosi. Selain desa wisata sebagai destinasi, promosi juga dilakukan terhadap usaha masyarakat, sehingga usaha tersebut mampu dijual kepada masyarakat secara luas, tidak hanya kepada wisatawan yang datang.

b. Penyelenggaraan event dan festival

Event dan festival merupakan salah satu fungsi promosi penting bagi destinasi pariwisata dalam meningkatkan kinerja destinasi pariwisata. Penyelenggaraan event dan festival sebaiknya memiliki kriteria antara lain:

- terkait dengan pola kehidupan masyarakat atau mata pencaharian masyarakat
- terkait dengan hasil produk utama desa, misalkan buah-buahan
- diprediksi untuk dapat dilakukan secara periodik dan berkelanjutan
- dibiayai secara mandiri atau dengan menggunakan sponsor

c. Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata lainnya antar desa wisata atau destinasi pariwisata lainnya

Kualitas produk desa wisata yang baik pada fase ini secara umum dapat melakukan kerjasama dengan pelaku wisata maupun antar desa wisata, juga destinasi pariwisata lainnya. Kerjasama tersebut bisa dalam bentuk antara lain:

- Kerjasama pengembangan produk pariwisata
- Kerjasama operasional desa wisata
- Kerjasama pemasaran desa wisata
- Kerjasama pengembangan SDM desa wisata
- Kerjasama penggunaan lahan

KESIMPULAN

Dengan pedoman pengelolaan desa wisata diharapkan akan bermunculan daya tarik/daerah

tujuan wisata berupa desa wisata yang mampu mengembangkan desanya menjadi desa yang maju dan mandiri sehingga masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pedoman pengelolaan desa wisata sebagai tahapan dalam mengimplementasikan sebuah desa untuk menjadi desa wisata

- (1) Pada umumnya setiap desa berpotensi untuk menjadikan desa sebagai desa wisata, apabila masyarakat, pengelola desa atau dinas terkait mampu memulai dengan mengidentifikasi potensi yang dimiliki. Hal ini memberikan acuan dalam memulai untuk dapat melakukan self assessment desanya pada tahapan apa desanya untuk menjadi desa wisata, kemudian langkah dan tindak lanjut, seperti apa yang harus dilakukan untuk menjadikan desa wisata yang maju. Dalam pengelolaan desa wisata diperlukan sinergitas dari berbagai instansi/dinas terkait untuk memudahkan dalam pemahaman dan pengelolaan desa wisata.
- (2) Desa wisata merupakan desa yang dikelola dengan pelibatan masyarakat, sehingga organisasi dari masyarakat seiring berkembangnya desa yang memiliki dana operasional, karena dibantu oleh pemerintah maka diperlukan pertanggungjawaban secara legalitas, sehingga pembentukan organisasi pengelolaan desa wisata harus berada di dalam struktur desa dengan badan hukum yang capable. Diperlukan pembentukan badan hukum yang legal dalam mengelola desa wisata, baik berupa BUMDes maupun Koperasi, dan dimasukkan dalam struktur desa, sehingga kegiatan pengelolaan desa wisata masuk ke dalam program desa yang akan didanai oleh dana desa.
- (3) Sesuai dengan pengembangannya, maka diperlukan peningkatan atau penambahan pada instrumennya, jadi sebaiknya setelah setiap 2 tahun dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Diperlukan secara berkala sosialisasi kepada masyarakat, bahwa desa wisata investornya adalah masyarakat yang memiliki aktivitas dan lahan, dimana masyarakat terlibat secara langsung sebagai pengelola, walaupun ada keterlibatan investor harus berkomitmen

bahwa masyarakat yang harus memanfaatkan dalam hasil pengembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2006. *Strukturalisme Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kepel Press.
- Andi Prastowo. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau. 2012. *Kementerian Koperasi dan UKM*.
- Goodwin, Harold & Rosa Santili. 2009. *ICRT Occasional Paper 11 Responsible Tourism*. Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif. 2013.
- Kusmayadi dan E. Sugiarto. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Priasukmana, S. & Mulyadin, R.M. 2001. *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, Info Sosial Ekonomi, Vol. 2, No. 1*.
- Robert & Hall, Derek. 2001. *Rural Tourism & Recreation*. Wallingford, UK; New York: CABI Pub.
- Sastrayuda, Gumelar. 2010. *Tourism: Impact, Planning & Management*. Alfabeta. Bandung.
- Suansri, Pontjana. 2003. *Community Based Tourism Hand Book*. Thailand: Rest Project
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.
- Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009.
- Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 12 Tahun 2008.
- Wall, Geoff. 2012. *Asia Tourism Forum (ATF)*.